

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Bulan	M-t-m (%)	Y-o-y (%)	Y-t-d (%)
April	1,06	0,30	2,17
Mei	-1,20	-0,13	0,95
Juni	0,38	0,47	1,34

Pada bulan April 2025, inflasi mtm di Kabupaten Hulu Sungai Tengah turun dari bulan sebelumnya menjadi 1,06 %, kemudian di bulan Mei terjadi deflasi mtm -1,20%, dan kembali mengalami inflasi pada bulan Juni sebesar 0.38%.

Sedangkan secara *Year on year* (y-o-y), pada bulan April, inflasi di HST berada di angka 0,30%, cenderung turun dari bulan Maret. Sedangkan pada bulan Mei turun lagi sehingga terjadi deflasi sebesar -0,13% dan kembali naik di bulan Juni menjadi 0,47%.

Dapat dikatakan, keadaan inflasi di HST pada periode triwulan II ini jauh berada dibawah rentang target nasional $2,5\% \pm 1$. Hal ini terjadi karena komoditas dengan bobot terbesar di HST yaitu beras pada tahun 2025 ini harganya cenderung stabil dibanding dengan harga beras pada tahun 2024 lalu. yang rata-rata inflasinya disumbang oleh komoditas beras. Bahkan komoditas pendorong deflasi pada triwulan ini secara tahunan (yoy) pada peringkat pertama disumbang oleh komoditas beras.

Ke depan, beberapa risiko inflasi telah diidentifikasi, antara lain:

1. Ketergantungan Pasokan Eksternal, di mana over-suplai atau gangguan distribusi dari luar dapat menyebabkan fluktuasi harga ekstrem pada komoditas penting.
2. Berakhirnya subsidi energi, di mana pencabutan subsidi tarif listrik dan fluktuasi harga BBM non-subsidi secara tidak langsung berpotensi mendorong inflasi.
3. Kondisi Iklim dan Produksi Lokal, di mana perubahan musim dan cuaca ekstrem dapat mempengaruhi dari hasil pertanian lokal sehingga menimbulkan tekanan harga.
4. Ketidakseimbangan Permintaan Menjelang Hari Besar, di mana Kebutuhan meningkat drastis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dapat memicu inflasi musiman jika tidak diantisipasi dengan stok dan distribusi memadai.
5. Fluktuasi Komoditas Global, jika terjadi lonjakan harga bahan pangan global, daerah yang bergantung impor atau suplai luar akan terimbas secara langsung.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menganalisis berbagai faktor penyebab tekanan inflasi di daerah, TPID HST mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang signifikan, yakni:

1. Transisi Tarif Listrik: Berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik masih menjadi faktor penyumbang inflasi bulanan pada bulan April.
2. Over suplai komoditas pertanian dari luar HST terutama komoditas cabe rawit, cabe merah, bawang merah dan bawang putih menyebabkan penyumbang utama deflasi di bulan Mei.
3. Penurunan harga tarif BBM non Subsidi menjadi salah satu penyumbang deflasi di triwulan 2 ini.

- Hampir semua jenis ikan sungai mengalami penurunan harga di bulan Juni.
5. Peristiwa mogoknya para sopir termasuk kapal laut pengangkut bawang merah menyebabkan Komoditas bawang merah yang menjadi mahal.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah

- Informasi harga bahan pangan secara rutin dengan posting *story* di medsos Instagram *kominfo_hst*.
- Pertemuan Koordinasi TPID Kab. HST Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Bersama Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 April 2025.
- Mendampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan Monitoring ke Agen Gas LPG dan Pangkalan pada tanggal 6 Mei 2025
- Rapat Koordinasi TPID Kab. HST Dalam Rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Hari Raya Idul Adha 1446 H pada tanggal 27 Mei 2025.
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah terhadap beberapa barang kebutuhan pokok/barang penting menjelang/menghadapi Hari Raya Idul Adha 1446 H di Halaman Kantor Kecamatan Batang Alai Utara (04 Juni 2025).
- Pelaksanaan Pasar Murah di Halaman Kantor Polres HST (16 Juni 2025), di Lapangan Dwiwarna (18 Juni 2025) dan di Halaman Stadion Murakata Desa Mandingin (23 Juni 2025).
- Sidak/monitoring Distributor Kebutuhan Pokok Tim TPID bersama Polres HST pada tanggal 04 Juni 2025 dalam rangka Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Hari Raya Idul Adha 1446 H.
- Pemantauan harga bahan pangan/pokok secara rutin oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dijalankan selama triwulan kedua 2025, TPID HST meyoroti sejumlah kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan:

- Publikasi informasi harga bahan pangan dengan penyebaran informasi melalui media sosial resmi dapat meningkatkan transparansi dan kesadaran masyarakat terhadap dinamika harga.
- Koordinasi dengan instansi terkait dapat mempermudah dan meningkatkan dalam hal koordinasi lintas sektor serta pengawasan distribusi barang.
- Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah terbukti efektif menjaga daya beli dan menahan lonjakan harga di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi sasaran.
- Pemantauan harga bahan pokok dapat menyesuaikan dan menyajikan data yang lebih akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.

Kelemahan:

- Publikasi informasi harga penyebarannya terbatas bagi masyarakat lanjut usia dan yang tidak aktif di media sosial ataupun wilayah yang terbatas akses internet.

Koordinasi dengan instansi terkait, belum semua hasil pengawasan ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi atau sanksi yang tegas.

- Jangkauan gerakan pangan murah dan pasar murah masih terbatas, belum mencakup seluruh kecamatan
- Monitoring barang terutama LPG bersubsidi masih kurang optimal karena keterbatasan di lapangan, dan masih ada beberapa hasil monitoring belum diolah menjadi strategi jangka panjang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk memperkuat strategi ke depan dan meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi, TPID HST mengusulkan beberapa rekomendasi, yakni:

- Ketersediaan Pasokan
- Koordinasi dengan Bulog dan distributor pangan.
- Percepatan operasional Perumda Murakata.
- Pemanfaatan lahan Bulog di sekitar Lab Link DLHP.
- Keterjangkauan Harga
- Operasi pasar murah dan subsidi distribusi.
- Penyaluran bantuan pangan strategis.
- Kelancaran Distribusi
- Pengawasan distribusi LPG dan komoditas pokok.
- Penataan pasar untuk cegah penimbunan.
- Komunikasi Efektif
- Edukasi konsumsi bijak.
- Publikasi harga dan info pasar murah.
- Mengenai Jumlah tenaga kontrak pemantau harga berkurang akibat kebijakan pusat. Ditawarkan Solusi jangka pendek: Optimalisasi ASN fungsional dan metode sampling prioritas. Solusi jangka menengah: Pengembangan sistem pelaporan digital dan pelibatan perangkat desa.